BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skema pembelajaran di Indonesia memiliki posisi krusial demi menunjang proses pembangunan nasional, terutama dalam hal pengembangan kualitas sumber daya manusia (Octavia and Savira). Proses pembangunan manusia secara utuh tidak dapat dilepaskan dari kontribusi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang krusial untuk kehidupan, karena memiliki keterkaitan yang erat dengan setiap aspek kehidupan. Demi meraih kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, banyak orang telah mengejar pendidikan sejak usia dini. Secara umum, pengertian pendidikan dapat dijelaskan melalui berbagai pendapat para ahli di bidangnya. Sesuai Pasal 1 No. 20 tahun 2003 pada UU Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran mengacu pada proses terstruktur dan terarah yang bertujuan untuk mengembangkan pengalaman belajar yang memotivasi siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka. Pengembangan ini mencakup unsur-unsur seperti kecerdasan, keterampilan, karakter, disiplin diri, spiritualitas, dan moralitas, yang semuanya berkontribusi positif bagi individu, bangsa, dan masyarakat luas (Risaranto). Seperti contoh, fokus utama dalam pembangunan pendidikan pada periode 2015–2019 adalah memastikan lulusan memiliki keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan. Demi tercapainya hal itu, perlu adanya penguatan kualitas proses pembelajaran serta pembenahan mutu hasil dari program pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Lembaga pendidikan dipercaya oleh masyarakat secara luas untuk membina dan mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi persaingan di kancah global, yang berkontribusi pada meningkatnya berbagai aktivitas dalam kehidupan sosial. Untuk memastikan generasi penerus memiliki kompetensi yang memadai, penguatan sumber daya manusia merupakah suatu hal krusial. Keberhasilan pada meningkatkan

mutu pendidikan sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik dan pihak terkait yang terlibat proses pendidikan. Oleh karenanya, lembaga pendidikan pun merancang strategi tertentu guna mencapai tujuan tersebut secara optimal. Guna mencapai tujuan yang diharapkan, dibutuhkan kolaborasi serta keterampilan dari setiap individu, termasuk peningkatan kinerja dan pemanfaatan optimal potensi tenaga pendidik. Selain itu, organisasi juga memiliki peran krusial dalam membangun suasana kerja yang kondusif dan mendukung agar mampu menumbuhkan sikap profesional dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bidang masing-masing (Siagian). Untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar, berbagai bentuk program kebijakan publik telah dirumuskan oleh pemerintah. Melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata dan luas serta pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP, salah satu upaya tersebut telah dilakukan. Untuk mempermudah masyarakat, terutama yang mengalami kendala geografis dan kesulitan ekonomi, program ini bertujuan memberikan akses layanan pendidikan dasar (Sugesti, Asri, and Sudirah 2022). Menurut Handoko (Handoko, Rustiadi, and Mukarromah 2020) pelaksanaan pendidikan berlangsung melalui berbagai jalur, baik secara formal maupun nonformal. Pendidikan jasmani memegang peranan krusial dalam membentuk manusia secara menyeluruh, sebab tidak mungkin mencapai pendidikan yang utuh tanpa melibatkan aspek jasmani. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, olahraga juga telah menjadi bagian dari identitas industri yang memberikan nilai tambah yang cukup besar. Pemerintah menetapkan standar pendidikan nasional yang mencakup persyaratan kelulusan, metode pengajaran, kualitas pendidik, infrastruktur, manajemen, pendanaan, dan sistem evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di negara ini.

Untuk menjaga kelangsungan pendidikan, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai respons terhadap semakin

kompleksnya kebutuhan di sektor pendidikan (Adi, Fikrianto, and Suratni). Dinas Pendidikan Kota Malang bertugas melaksanakan kebijakan pendidikan daerah sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah dan mengawasi sekolah negeri di wilayahnya. Pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) merupakan salah satu tanggung jawab utamanya. Badan ini juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah yang berada dalam lingkup kewenangannya (Fatimah, Setiawan, and Wardani 2019).

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan sarana pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekaligus menjamin agar seluruh warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu secara adil dan tanpa diskriminasi (Rudi 2021). Pemerintah Indonesia juga berkontribusi signifikan terhadap pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan membantu atau menurunkan biaya pendidikan di negara ini. Biaya personal, biaya operasional, dan biaya investasi adalah tiga kategori yang digolongkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dana ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan karena digunakan untuk membiayai seluruh biaya pendidikan di Indonesia.

Indonesia menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP dalam upaya mengurangi biaya pendidikan dan mempermudah penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas. Khususnya, siswa SD dan SMP, baik yang terdaftar di sekolah negeri maupun swasta, dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Siswa SD dan SMP negeri juga dibebaskan dari biaya operasional. Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengalokasian dana BOS menghadirkan sejumlah kesulitan. Program ini merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah pusat yang diberikan kepada seluruh siswa SMP/MTs dan SD/MI di sekolah negeri maupun

swasta di Indonesia. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS), yang tercermin dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemerintah berkomitmen untuk memastikan terlaksananya program Wajib Belajar gratis, setidaknya di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama (Hadiyanto 2015). Bantuan ini bertujuan untuk meringankan atau bahkan menghilangkan sepenuhnya beban keuangan yang saat ini ditanggung masyarakat akibat biaya pendidikan. Diharapkan semua anak dapat melanjutkan pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dengan program pemerintah ini (Yusri 2019). Menurut Todaro (1993:120), kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat mempengaruhi laju pertumbuhan sosial dan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Irawati, Kara, and Umar 2018). Sistem pendidikan formal dipandang sebagai sarana kelembagaan utama dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Banyak negara di kawasan Dunia Ketiga menganggap bahwa perluasan akses pendidikan secara cepat dan luas merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan nasional.

Dana BOS didapatkan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Malang. Dan yang mendapatkan dana BOS dari pemerintah pada tahun 2020, semua SMP yang ada di Kota Malang. Terdapat 27 SMP mulai dari SMPN 1 Kota Malang hingga SMPN 27 Kota Malang. Jumlah total dana BOS pemberian dari pemerintah yang kemudian diberikan kepada semua SMP yang ada di Kota Malang pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.143.740.000 milyar, dengan setiap sekolahnya memunculkan jumlah dana yang berbeda-beda karena tidak ada persentase yang tetap dan dana BOS yang diberikan tergantung pada jumlah siswa yang ada disetiap sekolah tersebut. Setiap siswa disekolah akan mendapatkan dana sebesar 115.000 ribu rupiah per anak dan akan dikalikan dengan jumlah siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Kemudian akan menghasilkan jumlah total dana disetiap sekolahnya.

Tabel 1.1 Jumlah siswa paling sedikit dan terbanyak perkelas

Siswa Paling Sedikit		Jumlah	Siswa Paling Banyak		Jumlah
Kelas 7	SMPN 27 Malang	127 siswa	Kelas 7	SMPN 02 Malang	351 siswa
Kelas 8	SMPN 25 Malang	131 siswa	Kelas 8	SMPN 02 Malang	353 siswa
Kelas 9	SMPN 25 Malang	121 siswa	Kelas 9	SMPN 02 Malang	347 siswa

Tabel 1.2 SMPN yang mendapatkan pagu paling sedikit dan terbanyak

SMPN	Jumlah Pagu
SMPN 02 Malang	1.324.260.000
SMPN 25 Malang	480.060.000

Dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, jumlah siswa paling sedikit yaitu SMPN 25 Malang dengan jumlah keseluruhan 381 siswa, dan yang menunjukkan jumlah siswa paling banyak yaitu SMPN 02 Malang dengan jumlah keseluruhan 1051 siswa. Didalam tabel 2 yang menunjukkan jumlah siswa paling sedikit dikelas 7 yaitu SMPN 27 Malang dengan jumlah 127 siswa, dengan total siswa keseluruhan 403 siswa. Jadi yang menduduki jumlah siswa paling sedikit tetap SMPN 25 Malang dengan jumlah 381 siswa. Jika sudah terlihat dari jumlah siswanya, maka jumlah pagu yang diterima sekolah tersebut juga akan terlihat perbedaannya. Jumlah pagu yang diterima oleh sekolah menyesuaikan dari jumlah siswa di setiap masing-masing sekolah dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Jika jumlah siswa disekolah tersebut sedikit, maka jumlah pagu yang akan didapatkan juga menunjukkan angka yang paling sedikit dibandingkan dengan sekolah lain, begitupun sebaliknya.

Menurut (Nugroho, Widowati, and Rihandoyo 2016) didalam penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan sesuai Permendiknas 37 tahun 2012 hanya 2 dari 4 SMP Negeri di Semarang yang memenuhi 13 komponen penggunaan dana BOS. Meskipun SMP negeri Semarang menerima dana dari BOS, mereka tetap mengenakan biaya tambahan termasuk pembelian seragam sekolah, mata pelajaran tambahan,

dan biaya untuk kebutuhan kelas. Pelaksanaan program BOS turut berkontribusi dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap prestasi akademik serta angka kelulusan siswa. Ketersediaan fasilitas informasi yang transparan serta sosialisasi yang rutin dari unit kerja kepada pelaksana program di sekolah dapat membantu kelancaran pelaksanaan proyek di sekolah tersebut. Proses pelaksanaan proyek akan menjadi lebih lancar jika pelaksana proyek memahami prosedur pelaksanaan BOS, termasuk keterampilan dalam manajemen pembukuan dan pelaporan, serta didukung oleh latar belakang pendidikan yang relevan.

Selain itu, menurut penelitian (Panganti 2021) dalam rangka menyesuaikan sistem penyaluran dana BOS, proses pendaftaran dan alokasi dana di SMPN 1 Gondanglegi masih memerlukan metode yang lebih efektif dibandingkan dengan yang saat ini digunakan, termasuk pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Penyaluran dana BOS di SMPN 1 Gondanglegi Malang, sudah sesuai standar dan tepat sasaran, namun masih perlu perbaikan agar penggunaannya lebih optimal dan mendukung program secara maksimal. Jika dilihat kembali, implementasi kebijakan dana BOS di Kota Malang juga telah memenuhi standar implementasi yang berlaku. Tidak banyak masalah yang perlu diperbaiki seperti di SMP 1 Gondanglegi.

Seperti perbandingan dua peneliatan diatas, pengimplementasian dana BOS hampir sepenuhnya menunjukkan keberhasilan diberbagai kota. Hanya saja masih ada beberapa kekurangan atau kecurangan yang dilakukan oleh sekolah untuk mencari keuntungan. Namun kecurangan tersebut beruntungnya hanya ditemui disatu atau dua sekolah di Indonesia, salah satunya seperti di SMPN Semarang. Sedangkan penerimaan dana BOS SMP Negeri di Kota Malang sendiri, sekolah menerima dana sesuai yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Walaupun ada beberapa sekolah yang menunjukkan bahwa sekolah tersebut unggulan yang siswanya memiliki ekonomi menengah keatas, dana BOS tetap diberikan karena sudah menjadi

ketentuan dari pusat bahwa dana BOS akan diberikan secara merata. Sejauh ini SMP Negeri di Kota Malang, belum ada kecurangan dari sekolah yang memungut biaya tambahan seperti contoh kasus penelitian diatas.

Adapun juga dalam penggunaan dana BOS masih ada faktor-faktor penghambat dalam pelaksaan, pemberian dan pengelolaan dana. Beberapa faktor tersebut adalah kurang tepatnya pihak sekolah dalam mencairkan dana BOS. Seringkali terjadi dibeberapa sekolah meminta secara mendadak untuk mencairkan dana BOS agar keperluan sekolah segera terpenuhi. Selain itu, dalam proses implementasi penggunaan dana BOS, terkadang masih banyak pihak yang kurang memahami tujuan dan penggunaan dana BOS, sehingga seringkali menjadi beban bagi pihak sekolah. Maka dari itu penelitian ini membutuhkan analisis data tentang permasalahan terkait yang akan dibahas sesuai judul. Analisis diperlukan sebagai bagian dari proses peninjauan untuk memahami skenario nyata guna memahami pelaksanaan pengelolaan BOS. Hasil analisis ini disusun secara sistematis sebagai dasar pengambilan kebijakan. Analisis juga digunakan untuk membandingkan penerapan dan menentukan tingkat keberhasilan mengenai kebijakan dana BOS di Kota Malang. Untuk lebih lanjut, penjelasan mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan dana BOS beserta analisisnya akan dibahas lebih lanjut didalam pembahasan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana SMP di Kota Malang Melaksanakan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)?
- Apa saja kendala yang menyebabkan SMP di Kota Malang tidak dapat melaksanakan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang melaksanakan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
2. Untuk menemukan ada tidaknya kendala yang menyebabkan SMP di Kota Malang tidak dapat melaksanakan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

   Pada analisis penelitian ini bisa menjadi referensi untuk studi selanjutnya tentang pelaksanaan kebijakan Bosda di SMP Kota Malang, sekaligus bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan mahasiswa dalam memahami manfaat program Bosda.
2. Secara Teoritis

   Analisis dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini bisa memperluas pemahaman dan wawasan tentang pelaksanaan kebijakan BOSDA di SMP Kota Malang.

1.5 Definisi Konseptual

a. Implementasi Kebijakan Publik

   Teori George C. Edward. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92)

   mencetuskan bahwa pelaksanaan dalam suatu ketetapan bisa terpengaruh oleh beberapa variable, diantaranya:

   a) Komunikasi, sejauh mana seseorang menerapkan kebijakan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan kegiatan yang harus dilakukan sangat penting bagi efektivitas implementasi (Subekti, Faozanudin, and Rokhman 2017).

b) Sumber daya, walaupun kebijakan sudah disampaikan dengan jelas, kekurangan sumber daya pada pelaksana akan menghambat efektivitas pelaksanaan.
c) Disposisi, kepribadian dan karakter pelaksana kebijakan, seperti dedikasi, kejujuran, dan keterbukaan, sangat berperan penting dalam kelancaran implementasi. Apabila pelaksana memiliki sikap yang baik, maka tujuan kebijakan akan lebih mudah dicapai.
d) Struktur birokrasi, pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan implementasi, di mana disposisi mencakup elemen-elemen dalam struktur organisasi seperti Prosedur Operasional Standar serta pembagian tugas atau fragmentasi. (Subekti et al. 2017).

Secara sederhana implementasi kebijakan adalah tindakan nyata pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu cara menganalisisnya adalah pendekatan top-down, di mana keputusan dari pengambil kebijakan harus dijalankan oleh semua instansi dan birokrat di berbagai tingkat, khususnya di level bawah. Analisis dengan metode ini fokus pada pencapaian tujuan resmi kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan pada akhirnya sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan (Hastuti and Soehartono 2018).

b. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Kebijakan dana BOS adalah percepatan penyelesaian program sembilan tahun pendidikan wajib berkualitas tinggi merupakan tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Regina, Soeaidy, and Ribawanto 2015). Program BOS merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan dana operasional nonpersonalia bagi pendidikan dasar dalam mendukung program wajib belajar. Berdasarkan PP No. 48 Tahun 2008, biaya nonpersonalia mencakup

kebutuhan seperti alat tulis, listrik, air, telekomunikasi, perawatan fasilitas, transportasi, konsumsi, dan pajak (Regina et al. 2015). Meskipun sebagian biaya investasi dan personalia masih dapat dibiayai dari dana BOS, kebijakan ini telah disesuaikan dengan peningkatan dana per siswa dan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN. Program BOS merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pendidikan dasar tanpa dikenakan biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) (Hadiyanto 2015).

1.6 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini, sebagai berikut:

1) Implementasi Atau Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Tingkat SMP di Kota Malang
   a. Ketepatan, besaran, dan kesesuaian sasaran penerimaan dana BOS pada tingkat SMP di Kota Malang.
   b. Pengawasan dan Evaluasi penerimaan dana BOS pada tingkat SMP di Kota Malang.
2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Tingkat SMP di Kota Malang
   a. Kebutuhan sekolah yang mendadak sehingga dana bos tidak bisa dicairkan dengan cepat.
   b. Kesalahan pencatatan rekening dalam menggunakan dana BOS.

1.7 Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

   Metode dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan mendeskripsikan subjek yang diteliti. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberi arti kepada data dengan menampilkannya dalam keadaan saat ini. Metode ini melibatkan pencatatan kejadian, situasi, kondisi, dan perilaku spesifik, hasilnya

kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk membuat kesimpulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menjadi tempat untuk melakukan penelitian ini, kemudian untuk menyelidiki bagaimana kebijakan BOSDA diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah tersebut.

2) Sumber Data

Sumber datanya terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Informasi dikumpulkan dari sumber utama menggunakan pertanyaan wawancara yang direncanakan dan dikenal sebagai data primer. Percakapan dan tindakan yang diamati dicatat atau direkam sebagai dokumentasi, kemudian dijadikan bahan kajian dalam meneliti implementasi kebijakan BOS di bidang Perencanaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini untuk mendukung keakuratan informasi dalam penelitian, data sekunder merupakan informasi tambahan yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui bahan-bahan pendukung antara lain buku, jurnal, artikel, dan situs web resmi Dinas Pendidikan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Metodologi atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi guna menjelaskan suatu studi disebut metode pengumpulan data. Untuk menjamin keandalan dan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan metode ini dengan kenyataan, diperlukan proses yang metodis dan terencana. Selain itu, teknik pengumpulan data sering kali digunakan untuk mengumpulkan informasi abstrak yang tercermin dalam penggunaan objek, alih-alih informasi yang tampak secara fisik. Data untuk studi ini dikumpulkan dengan beberapa cara, antara lain:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari narasumber agar informasi yang diperoleh akurat. Selain itu, wawancara membantu menggali masalah dan memahami pandangan responden lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara bersifat bebas dan tidak terstruktur, memungkinkan pertanyaan fleksibel tentang pandangan, sikap, dan keyakinan. Informan yang diwawancarai adalah staf pengelola dana Bosda di bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber cetak dan digital, termasuk buku, jurnal, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Data tentang implementasi kebijakan Bosda di tingkat SMP di Kota Malang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi.

c. Observasi

Metode observasi merupakan strategi pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian perilaku suatu objek secara metodis dan langsung. Menurut Nana Sudjana, observasi memerlukan pencatatan secara metodis terhadap kejadian pada saat penelitian, langsung ataupun tidak langsung. Untuk membandingkan secara langsung pelaksanaan dana BOS, observasi dilakukan di bagian Perencanaan Dinas Pendidikan.

4) Subjek Penelitian

Individu atau kelompok sampel yang secara langsung atau tidak langsung memberikan data dan masukan kepada peneliti dikenal sebagai subjek penelitian. Maka dari itu, subjek dari penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Malang dan staff pegawai sebagai pengurus dana Bosda yang menjadi kunci

informan penting dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Bosda pada tingkat SMP di Kota Malang.

5) Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga selesai. Analisis ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap analisis kualitatif yang mengklarifikasi dan mengatur data sekaligus membuang informasi yang tidak diperlukan agar materi lebih mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan. Proses ini dilakukan dengan meninjau kembali data hasil pengamatan selama penelitian, serta wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Malang dan staf pengelola dana Bosda terkait pelaksanaan kebijakan Bosda di tingkat SMP Kota Malang.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap analisis kualitatif yang mengatur data secara terstruktur agar mudah dipahami dan memudahkan penarikan kesimpulan. Dengan menyusun data secara terstruktur dan rinci, proses pemahaman menjadi lebih mudah. Hasil penyajian data ini juga membantu peneliti dalam menjelaskan pelaksanaan kebijakan Bosda pada jenjang SMP di Kota Malang.

c. Penarikan Kesimpulan

Untuk membahas topik penelitian dan memastikan bahwa hasil reduksi sejalan dengan tujuan penelitian, tahap terakhir analisis data adalah merumuskan kesimpulan, yang melibatkan pencarian signifikansi dalam hubungan, persamaan, atau kontras dalam data.